

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna dan proses ritual Larung Jatigede yang dilaksanakan oleh masyarakat di sekitar Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, dengan pendekatan teori liminalitas dari Victor Turner. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui studi literatur, observasi partisipatif, serta wawancara mendalam terhadap tokoh adat, sesepuh kampung, seniman, warga terdampak, dan pihak pemerintah daerah, dapat disimpulkan bahwa ritual Larung Jatigede bukan semata-mata seremoni tradisional, melainkan wujud dari dinamika budaya yang lahir dari pengalaman kehilangan, peralihan, dan rekonstruksi identitas kolektif masyarakat yang terdampak pembangunan Waduk Jatigede. Secara historis, pembangunan Waduk Jatigede merupakan proyek strategis nasional yang telah dirancang sejak tahun 1963 dan mulai terealisasi beberapa dekade kemudian. Proyek ini menyebabkan penggenangan ribuan hektar lahan, termasuk kampung-kampung, pemukiman, makam leluhur, dan ruang hidup masyarakat adat yang sebelumnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Penggenangan ini berdampak besar secara sosial, ekonomi, psikologis, dan kultural. Masyarakat harus meninggalkan tanah kelahiran, berpindah tempat tinggal, beradaptasi dengan profesi baru, dan menghadapi ketidakpastian akan hak-hak mereka. Dalam konteks ini, ritual Larung muncul sebagai ekspresi kultural yang tidak hanya menjadi media mengenang, tetapi juga sebagai sarana pemulihan dan transformasi sosial.

Melalui analisis teori liminalitas Victor Turner, ritual Larung dipahami sebagai representasi dari fase-fase pemisahan (separation), ambang (liminality), dan reintegrasi (incorporation). Pada tahap separation, masyarakat mengalami keterputusan dari ruang hidup lamanya akibat pembangunan waduk yang menenggelamkan kampung halaman mereka. Fase ini ditandai dengan kehilangan tanah, relasi sosial, dan ikatan spiritual yang selama ini melekat pada ruang geografis mereka. Trauma dan keresahan muncul dalam proses tersebut, terlebih ketika hak-hak atas tanah dan relokasi belum selesai secara tuntas.

Fase kedua, liminality, merupakan fase paling kompleks dalam pengalaman masyarakat Jatigede. Mereka berada dalam kondisi "mengambang", yaitu belum sepenuhnya terikat pada tempat baru, namun sudah kehilangan tempat lama. Di sinilah ritual Larung memainkan peran penting. Prosesi Larung yang dimulai dengan ziarah ke makam-makam leluhur yang telah direlokasi, pengiringan umbul-umbul dan sesajen, tarian Umbul, pelarungan sesajen ke tengah waduk, hingga kegiatan simbolik seperti penanaman pohon dan pembacaan doa, seluruhnya menjadi ekspresi spiritual sekaligus media simbolik untuk memaknai peralihan ini. Prosesi tersebut menegaskan kembali hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan Tuhan, sekaligus menjadi momen perenungan kolektif atas perubahan besar yang mereka alami.

Tahap terakhir, incorporation, menunjukkan bagaimana masyarakat Jatigede pada akhirnya membentuk cara baru dalam berdamai dengan realitas. Mereka menyadari bahwa tidak mungkin kembali ke masa lalu, namun tetap mempertahankan nilai-nilai yang mereka anggap sakral melalui adaptasi budaya.

Ritual Larung kemudian menjadi ritual tahunan yang tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian budaya, namun juga sebagai bentuk pengakuan terhadap sejarah dan pengalaman traumatis mereka. Dalam konteks ini, ritual Larung menjadi ruang aktualisasi identitas, solidaritas, dan harapan baru. Mereka menjadikan ritual ini sebagai titik temu antara masa lalu dan masa depan, antara kesedihan dan kekuatan untuk melanjutkan kehidupan.

Lebih jauh, ritual Larung juga telah memfasilitasi proses adaptasi identitas masyarakat yang terdampak. Setelah kehilangan lahan pertanian dan berubahnya lanskap sosial akibat penggenangan waduk, masyarakat menghadapi kebutuhan untuk membentuk identitas baru tidak lagi sebagai masyarakat agraris murni, melainkan sebagai komunitas yang hidup berdampingan dengan perairan dan perubahan struktur sosial. Dalam kerangka ini, ritual Larung menjadi cara untuk menjaga kesinambungan nilai-nilai lama dengan konteks baru, seperti penghormatan terhadap leluhur yang kini dilakukan melalui prosesi budaya, serta solidaritas sosial yang diperkuat melalui kerja kolektif dalam menyelenggarakan upacara. Ritual ini juga telah membuka ruang baru bagi artikulasi identitas masyarakat Jatigede pasca-penggenangan. Dalam prosesi ritual, partisipasi lintas generasi, keterlibatan seniman dan akademisi, serta dukungan pemerintah daerah menunjukkan terbentuknya komunitas kultural baru yang inklusif. Identitas masyarakat tidak lagi terikat semata pada lokasi geografis, melainkan tumbuh dari pengalaman bersama dalam menghadapi perubahan. Identitas ini tidak statis, namun adaptif dan dinamis, dibentuk melalui memori kolektif, narasi budaya, dan praktik simbolik yang terus diperbaharui.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ritual Larung Jatigede bukan sekadar prosesi adat, tetapi merupakan manifestasi dari dinamika liminalitas masyarakat yang menghadapi transformasi besar. Ia menjadi media penyembuhan, peneguhan identitas, serta jembatan antara keterputusan dan kontinuitas budaya. Penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam ketegangan antara kehilangan dan keberlanjutan, budaya lokal mampu bertransformasi dan menegaskan perannya dalam menghadapi perubahan sosial yang kompleks.

## **5.2 Saran**

Ritual Larung Jatigede telah berkembang menjadi representasi budaya masyarakat terdampak pembangunan waduk, sekaligus menjadi ruang pemulihan identitas kolektif. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan lapangan, termasuk wawancara dengan berbagai aktor kunci, penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat maupun yang berkepentingan dengan keberlangsungan tradisi ini. Ritual Larung telah resmi dinobatkan sebagai event budaya tahunan oleh DISPARBUDPORA Kabupaten Sumedang. Meskipun dukungan yang diberikan dinas selama ini masih bersifat minimal dan simbolis, pengakuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat eksistensi ritual sebagai bagian dari warisan budaya takbenda daerah. Oleh karena itu, disarankan agar dukungan tersebut tidak hanya berhenti pada penetapan administratif, tetapi dilanjutkan dengan keterlibatan yang lebih nyata, baik dalam bentuk pembiayaan, fasilitasi, hingga promosi melalui kanal resmi pemerintahan. Dinas terkait juga dapat memanfaatkan momen ritual Larung sebagai sarana strategis untuk

mengintegrasikan potensi wisata, ekonomi kreatif, dan olahraga. Gagasan seperti parade perahu hias, bazar kuliner dan kerajinan lokal, lomba tumpeng, hingga lomba dayung menggunakan rakit adalah bentuk sinergi antara nilai budaya dengan peluang pengembangan wilayah secara berkelanjutan. Hal ini akan menciptakan dampak yang lebih luas tidak hanya bagi pelestarian budaya, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatigede.

Bagi Lembaga Adat sebagai motor penggerak utama ritual Larung diharapkan dapat terus menjaga dan mengembangkan ritual ini tanpa kehilangan makna aslinya. Penguatan narasi budaya yang menyentuh aspek spiritual, historis, serta ekologis perlu terus digaungkan. Penulis menyarankan membentuk lembaga khusus pengelola ritual Larung yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, dari sesepuh hingga pemuda. Selain itu juga penting untuk selalu menggandeng seniman lokal, budayawan, dan akademisi untuk memperkaya narasi dan menambah dimensi pengetahuan dalam pelaksanaan ritual. Dalam era ini juga sudah seharusnya melibatkan generasi muda secara aktif, baik dalam pelaksanaan ritual maupun dalam dokumentasi dan promosi agar terjadi regenerasi nilai budaya.

Bagi masyarakat Jatigede sendiri, partisipasi aktif dalam setiap tahapan ritual dan kesediaan untuk terlibat dalam pengelolaan kegiatan budaya menjadi kunci keberlangsungan tradisi ini. Mereka tidak hanya menjadi pelaku budaya, tetapi juga penjaga narasi sejarah dan identitas kolektif. Kesadaran untuk mempertahankan nilai-nilai lokal sekaligus membuka diri terhadap transformasi sosial akan memperkuat ketahanan budaya mereka di tengah perubahan zaman. Dengan kolaborasi yang solid antara masyarakat, lembaga adat, dan pemerintah, ritual

Larung tidak hanya akan bertahan sebagai peninggalan masa lalu, tetapi terus berkembang menjadi sarana rekonsiliasi, pembelajaran, dan transformasi budaya yang hidup dan relevan untuk generasi mendatang.

### 5.3 Rekomendasi

Ritual Larung Jatigede telah berkembang menjadi lebih dari sekadar peristiwa budaya tahunan. Ia menjadi ruang kultural yang sarat makna, mengikat kembali kolektivitas yang tercerai oleh pembangunan, dan menciptakan ruang rekonsiliasi antara kenangan, realitas baru, dan harapan masa depan. Namun, agar ritual ini tetap hidup, berkembang, dan memiliki kontribusi nyata bagi masyarakat, dibutuhkan strategi keberlanjutan yang menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara mendalam, berikut rekomendasi yang dapat menjadi dasar arah kebijakan ke depan:

a) **Komitmen Pemerintah Daerah secara berkelanjutan**

Meski ritual Larung telah ditetapkan sebagai event budaya tahunan oleh Pemda, namun secara faktual, penyelenggaraannya masih mengandalkan inisiatif swadaya dari masyarakat adat. Pemerintah daerah perlu memperkuat komitmen tidak hanya dalam bentuk pengakuan formal, tetapi juga dalam bentuk dukungan anggaran, promosi, dan fasilitasi logistik secara nyata dan berkesinambungan. Setelah itu diharapkan juga kolaborasi Pemerintah, Komunitas Adat, dan Seniman Lokal untuk memperkuat kerja sama lintas sektor untuk menjadikan Ritual Larung sebagai agenda budaya tahunan yang berskala lebih luas, bahkan ke tingkat nasional atau internasional, sekaligus sebagai daya tarik wisata budaya. Yang terakhir pemetaan

dan penanganan dampak sosial budaya lanjutan terkait peralihan masyarakat dari kehidupan agraris ke sektor perikanan atau profesi lain, sehingga program adaptasi sosial dan ekonomi dapat disiapkan dengan matang dan tepat sasaran.

b) Pengembangan Event Lintas Bidang

Ritual Larung seharusnya bisa menjadi pusat perayaan tahunan yang tidak hanya mengangkat nilai budaya lokal, tetapi juga mampu mengintegrasikan potensi lintas bidang di bawah naungan DISPARBUDPORA, yakni pariwisata, kebudayaan, ekonomi kreatif, dan olahraga. Ketua Lembaga Adat, Pak Sihabudin, menyampaikan secara langsung dalam wawancara:

“Kalo saya mah kan sebagai Ketua Lembaga Adat merayu ke Dinas khususnya DISBUDPARPORA kan ada 4 bidang: kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan olahraga. Saya mah pengennya semua support. Jadi minimal di sini teh ada acara tambahan a. Misalkan bidang wisata saya kepengen ada parade seperti perahu hias, kan itu jadi daya tarik a untuk Jatigede. Itu juga sebenarnya bukan buat kita doang, untuk dinas juga bakal dapet keuntungan. Bidang ekonomi kreatif bisa ada bazar UMKM, misal lomba tumpeng, makanan tradisional, jajanan baheula dibikin konsep warung zaman sekarang gitu a. Di bidang olahraga juga kita bisa ada lomba dayung pake rakit atau apa gitu, kan banyak potensinya.”

Pernyataan ini tidak hanya menunjukkan ide visioner dari masyarakat adat, tetapi juga membuka peluang besar menjadikan Larung sebagai destinasi budaya sekaligus wahana pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Jika dikemas dengan tepat, Larung dapat menjadi ikon budaya Sumedang sekaligus motor penggerak wisata dan UMKM.

c) Komitmen Lembaga Adat terhadap Masyarakat

Keberhasilan penyelenggaraan ritual Larung tidak terlepas dari peran aktif lembaga adat. Oleh karena itu, lembaga adat harus diakui dan diperkuat sebagai mitra strategis pemerintah melalui pendampingan kelembagaan, pelatihan manajemen

budaya, dan akses pendanaan publik. Selain itu, pengembangan ritual Larung ke depan perlu melibatkan pendekatan kolaboratif antara masyarakat adat, akademisi, pelaku seni budaya, sektor swasta, media, dan pemerintah. Hal ini diharapkan dapat memperkuat posisi Ritual Larung Jatigede sebagai tradisi hidup yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus sebagai aset budaya yang dapat memberikan nilai sosial, ekonomi, dan psikologis dalam menghadapi perubahan zaman

